

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum
4. KEGIATAN

:

7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

01 - Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual		335.268.052,0
01.01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	100	
01.02	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	
Total			335.268.052,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual										335.268.052,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										225.986.091,0
01.EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan										19.942.127,0
	051 - Pengelolaan PPID										986.340,0
		Pusat	Pusat								986.340,0
	052 - Pengelolaan Call/Contact Center										6.006.000,0
		Pusat	Pusat								6.006.000,0
	053 - Pelayanan Pengaduan Masyarakat										392.256,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								392.256,0
	054 - Pengelolaan Komunikasi dan Relasi Media										12.557.531,0
		Pusat	Pusat								12.557.531,0
01.EBA.956	Layanan BMN										137.484,0
	051 - Penatausahaan BMN										137.484,0
		Pusat	Pusat								137.484,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi										441.900,0
	051 - Peliputan										253.650,0
		Pusat	Pusat								253.650,0
	052 - Publikasi										188.250,0
		Pusat	Pusat								188.250,0
01.EBA.959	Layanan Protokolер										15.474.749,0
	051 - Koordinasi Keprotokolерan										176.344,0
		Pusat	Pusat								176.344,0
	052 - Pelaksanaan Keprotokolерan										15.298.405,0
		Pusat	Pusat								15.298.405,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										5.581.855,0
	051 - Pengelolaan Kelembagaan										329.280,0
		Pusat	Pusat								329.280,0
	052 - Koordinasi Sistem dan Prosedur										723.308,0
		Pusat	Pusat								723.308,0
	053 - Penyusunan Peraturan tentang Layanan DJKI										4.529.267,0
		Pusat	Pusat								4.529.267,0
01.EBA.962	Layanan Umum										101.575.842,0
	051 - Layanan Urusan Kerumahtanggaan										95.524.440,0
		Pusat	Pusat								95.524.440,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pengelolaan Persuratan dan Perjalanan Dinas										788.520,0
		Pusat	Pusat								788.520,0
	053 - Administrasi dan Pengelolaan PBJ/UKPBJ										2.294.182,0
		Pusat	Pusat								2.294.182,0
	054 - Pengelolaan Kesehatan										2.968.700,0
		Pusat	Pusat								2.968.700,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran										82.832.134,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										50.632.411,0
		Pusat	Pusat								50.632.411,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										32.199.723,0
		Pusat	Pusat								32.199.723,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										23.585.482,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal										14.214.482,0
	051 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										4.018.000,0
		Pusat	Pusat								4.018.000,0
	053 - Peralatan Fasilitas Perkantoran										10.196.482,0
		Pusat	Pusat								10.196.482,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal										9.371.000,0
	051 - Gedung dan Bangunan										9.371.000,0
		Pusat	Pusat								9.371.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										34.143.416,0
01.EBC.001	Layanan Pengelolaan SDM										31.343.707,0
	051 - Administrasi Kepegawaian										13.862.319,0
		Pusat	Pusat								13.862.319,0
	052 - Pengelolaan SDM										11.850.963,0
		Pusat	Pusat								11.850.963,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pegawai										2.069.698,0
		Pusat	Pusat								2.069.698,0
	054 - Reformasi Birokrasi di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)										3.560.727,0
		Pusat	Pusat								3.560.727,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM										2.799.709,0
	051 - Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi										382.072,0
		Pusat	Pusat								382.072,0
	052 - Pengelolaan Kinerja Pegawai										343.200,0
		Pusat	Pusat								343.200,0
	053 - Pengembangan Talenta dan Karier Pegawai										690.700,0
		Pusat	Pusat								690.700,0
	054 - Pengembangan Kompetensi Pegawai										402.027,0
		Pusat	Pusat								402.027,0
	055 - Pemberian Penghargaan dan Pengakuan										290.000,0
		Pusat	Pusat								290.000,0
	056 - Pemberhentian pegawai										691.710,0
		Pusat	Pusat								691.710,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										48.796.159,0
01.EBD.001	Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran										2.507.004,0
	051 - Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran										1.377.259,0
		Pusat	Pusat								1.377.259,0
	052 - Supervisi Penyusunan Anggaran										1.129.745,0
		Pusat	Pusat								1.129.745,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBD.002	Fasilitasi Peningkatan dan Evaluasi Kinerja										14.496.034,0
	051 - Penyusunan SPIP										130.760,0
		Pusat	Pusat								130.760,0
	052 - Penyusunan SAKIP										190.190,0
		Pusat	Pusat								190.190,0
	053 - Pelaksanaan Survei IKM dan IPK DJKI										1.451.920,0
		Pusat	Pusat								1.451.920,0
	054 - Peningkatan Kualitas dan Evaluasi Kinerja										12.723.164,0
		Pusat	Pusat								12.723.164,0
01.EBD.003	Layanan Pengelolaan Keuangan										20.289.873,0
	051 - Pelaksanaan APBN										5.352.606,0
		Pusat	Pusat								5.352.606,0
	052 - Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Pemeriksaan										8.762.452,0
		Pusat	Pusat								8.762.452,0
	053 - Pelaksanaan Revisi Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan										4.281.362,0
		Pusat	Pusat								4.281.362,0
	054 - Pengelolaan PNBP										1.893.453,0
		Pusat	Pusat								1.893.453,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran										552.500,0
	051 - Layanan Perencanaan										543.650,0
		Pusat	Pusat								543.650,0
	052 - Layanan Panganggaran										8.850,0
		Pusat	Pusat								8.850,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi										240.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi										240.000,0
		Pusat	Pusat								240.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan										508.000,0
	051 - Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)										127.000,0
		Pusat	Pusat								127.000,0
	052 - Penyusunan Laporan Keuangan										127.000,0
		Pusat	Pusat								127.000,0
	053 - Pendampingan Tindak Lanjut Temuan BPK										127.000,0
		Pusat	Pusat								127.000,0
	054 - Pembinaan Pelaksanaan Anggaran										127.000,0
		Pusat	Pusat								127.000,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja										4.009.108,0
	051 - Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										3.573.153,0
		Pusat	Pusat								3.573.153,0
	052 - Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										435.955,0
		Pusat	Pusat								435.955,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan										6.193.640,0
	051 - Pengelolaan Arsip										6.193.640,0
		Pusat	Pusat								6.193.640,0
01.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										2.756.904,0
01.PFA.001	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional			2.756.904,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penyusunan Roadmap dan Naskah Konsepsi RPerpres Pengembangan KI										2.756.904,0
		Pusat	Pusat								2.756.904,0
Total											335.268.052,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual				335.268.052,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		225.986.091,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan	1	Layanan		19.942.127,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.001.051	Pengelolaan PPID	0,0	Layanan	0,0	986.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.001.052	Pengelolaan Call/Contact Center	0,0	Layanan	0,0	6.006.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.001.053	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	0,0	Layanan	0,0	392.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.001.054	Pengelolaan Komunikasi dan Relasi Media	0,0	Layanan	0,0	12.557.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		137.484,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.051	Penatausahaan BMN	0,0	Layanan	0,0	137.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		441.900,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.051	Peliputan	0,0	Layanan	0,0	253.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.052	Publikasi	0,0	Layanan	0,0	188.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		15.474.749,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959.051	Koordinasi Keprotokoleran	0,0	Layanan	0,0	176.344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959.052	Pelaksanaan Keprotokoleran	0,0	Layanan	0,0	15.298.405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		5.581.855,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Kelembagaan	0,0	Layanan	0,0	329.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Koordinasi Sistem dan Prosedur	0,0	Layanan	0,0	723.308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.053	Penyusunan Peraturan tentang Layanan DJKI	0,0	Layanan	0,0	4.529.267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		101.575.842,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.051	Layanan Urusan Kerumahtanggaan	0,0	Layanan	0,0	95.524.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBA.962.052	Pengelolaan Persuratan dan Perjalanan Dinas	0,0	Layanan	0,0	788.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.053	Administrasi dan Pengelolaan PBJ/UKPBJ	0,0	Layanan	0,0	2.294.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.054	Pengelolaan Kesehatan	0,0	Layanan	0,0	2.968.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		82.832.134,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	0,0	Layanan	0,0	50.632.411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	Layanan	0,0	32.199.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		23.585.482,0				0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	600	Unit		14.214.482,0	600	600	600	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0,0	Unit	0,0	4.018.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	0,0	Unit	0,0	10.196.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit		9.371.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971.051	Gedung dan Bangunan	1,0	Unit	9.371.000,0	9.371.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		34.143.416,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.001	Layanan Pengelolaan SDM	4	Layanan		31.343.707,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBC.001.051	Administrasi Kepegawaian	1,0	Layanan	13.862.319,0	13.862.319,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.001.052	Pengelolaan SDM	1,0	Layanan	11.850.963,0	11.850.963,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.001.053	Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pegawai	1,0	Layanan	2.069.698,0	2.069.698,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.001.054	Reformasi Birokrasi di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	1,0	Layanan	3.560.727,0	3.560.727,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	6	Layanan		2.799.709,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.051	Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi	1,0	Layanan	382.072,0	382.072,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kinerja Pegawai	1,0	Layanan	343.200,0	343.200,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Pengembangan Talenta dan Karier Pegawai	1,0	Layanan	690.700,0	690.700,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.054	Pengembangan Kompetensi Pegawai	1,0	Layanan	402.027,0	402.027,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.055	Pemberian Penghargaan dan Pengakuan	1,0	Layanan	290.000,0	290.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.056	Pemberhentian pegawai	1,0	Layanan	691.710,0	691.710,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		48.796.159,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.001	Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran	4	Dokumen		2.507.004,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.001.051	Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran	0,0	Dokumen	0,0	1.377.259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.001.052	Supervisi Penyusunan Anggaran	0,0	Dokumen	0,0	1.129.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002	Fasilitasi Peningkatan dan Evaluasi Kinerja	5	Dokumen		14.496.034,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.002.051	Penyusunan SPIP	0,0	Dokumen	0,0	130.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002.052	Penyusunan SAKIP	0,0	Dokumen	0,0	190.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002.053	Pelaksanaan Survei IKM dan IPK DJKI	0,0	Dokumen	0,0	1.451.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.002.054	Peningkatan Kualitas dan Evaluasi Kinerja	0,0	Dokumen	0,0	12.723.164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003	Layanan Pengelolaan Keuangan	4	Dokumen		20.289.873,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.051	Pelaksanaan APBN	0,0	Dokumen	0,0	5.352.606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.052	Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Pemeriksaan	0,0	Dokumen	0,0	8.762.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.053	Pelaksanaan Revisi Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan	0,0	Dokumen	0,0	4.281.362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.003.054	Pengelolaan PNPB	0,0	Dokumen	0,0	1.893.453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen		552.500,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.051	Layanan Perencanaan	0,0	Dokumen	0,0	543.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Layanan Penganggaran	0,0	Dokumen	0,0	8.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen		240.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.051	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	0,0	Dokumen	0,0	240.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen		508.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.051	Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	0,0	Dokumen	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Penyusunan Laporan Keuangan	0,0	Dokumen	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.053	Pendampingan Tindak Lanjut Temuan BPK	0,0	Dokumen	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.054	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	0,0	Dokumen	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen		4.009.108,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.051	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0,0	Dokumen	0,0	3.573.153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.052	Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0,0	Dokumen	0,0	435.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4	Dokumen		6.193.640,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.051	Pengelolaan Arsip	0,0	Dokumen	0,0	6.193.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		2.756.904,0				0,0	0,0	0,0
01.PFA.001	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	1	NSPK		2.756.904,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.PFA.001.051	Penyusunan Roadmap dan Naskah Konsepsi RPerpres Pengembangan KI	0,0	NSPK	0,0	2.756.904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					335.268.052,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual		82.832.134,0	252.435.918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335.268.052,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		82.832.134,0	143.153.957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.986.091,0
01.EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan		0,0	19.942.127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.942.127,0
01.EBA.001.051	Pengelolaan PPID	Utama	0,0	986.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	986.340,0
01.EBA.001.052	Pengelolaan Call/Contact Center	Utama	0,0	6.006.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.006.000,0
01.EBA.001.053	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Utama	0,0	392.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392.256,0
01.EBA.001.054	Pengelolaan Komunikasi dan Relasi Media	Utama	0,0	12.557.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.557.531,0
01.EBA.956	Layanan BMN		0,0	137.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137.484,0
01.EBA.956.051	Penatausahaan BMN	Utama	0,0	137.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137.484,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		0,0	441.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441.900,0
01.EBA.958.051	Peliputan	Utama	0,0	253.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253.650,0
01.EBA.958.052	Publikasi	Utama	0,0	188.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188.250,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler		0,0	15.474.749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.474.749,0
01.EBA.959.051	Koordinasi Keprotokoleran	Utama	0,0	176.344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176.344,0
01.EBA.959.052	Pelaksanaan Keprotokoleran	Utama	0,0	15.298.405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.298.405,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		0,0	5.581.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.581.855,0
01.EBA.960.051	Pengelolaan Kelembagaan	Utama	0,0	329.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329.280,0
01.EBA.960.052	Koordinasi Sistem dan Prosedur	Utama	0,0	723.308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723.308,0
01.EBA.960.053	Penyusunan Peraturan tentang Layanan DJKI	Utama	0,0	4.529.267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.529.267,0
01.EBA.962	Layanan Umum		0,0	101.575.842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101.575.842,0
01.EBA.962.051	Layanan Urusan Kerumahtanggaan	Utama	0,0	95.524.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95.524.440,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan Persuratan dan Perjalanan Dinas	Utama	0,0	788.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788.520,0
01.EBA.962.053	Administrasi dan Pengelolaan PBJ/UKPBJ	Utama	0,0	2.294.182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.294.182,0
01.EBA.962.054	Pengelolaan Kesehatan	Utama	0,0	2.968.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.968.700,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		82.832.134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82.832.134,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	50.632.411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.632.411,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	32.199.723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.199.723,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0,0	23.585.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.585.482,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		0,0	14.214.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.214.482,0
01.EBB.951.051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Utama	0,0	4.018.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.018.000,0
01.EBB.951.053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Utama	0,0	10.196.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.196.482,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		0,0	9.371.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.371.000,0
01.EBB.971.051	Gedung dan Bangunan	Utama	0,0	9.371.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.371.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		0,0	34.143.416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.143.416,0
01.EBC.001	Layanan Pengelolaan SDM		0,0	31.343.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.343.707,0
01.EBC.001.051	Administrasi Kepegawaian	Utama	0,0	13.862.319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.862.319,0
01.EBC.001.052	Pengelolaan SDM	Utama	0,0	11.850.963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.850.963,0
01.EBC.001.053	Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pegawai	Utama	0,0	2.069.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.069.698,0
01.EBC.001.054	Reformasi Birokrasi di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	Utama	0,0	3.560.727,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.560.727,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		0,0	2.799.709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.799.709,0
01.EBC.954.051	Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi	Utama	0,0	382.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382.072,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Utama	0,0	343.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343.200,0
01.EBC.954.053	Pengembangan Talenta dan Karier Pegawai	Utama	0,0	690.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690.700,0
01.EBC.954.054	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Utama	0,0	402.027,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402.027,0
01.EBC.954.055	Pemberian Penghargaan dan Pengakuan	Utama	0,0	290.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290.000,0
01.EBC.954.056	Pemberhentian pegawai	Utama	0,0	691.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691.710,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		0,0	48.796.159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.796.159,0
01.EBD.001	Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran		0,0	2.507.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.507.004,0
01.EBD.001.051	Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran	Utama	0,0	1.377.259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.377.259,0
01.EBD.001.052	Supervisi Penyusunan Anggaran	Utama	0,0	1.129.745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.129.745,0
01.EBD.002	Fasilitasi Peningkatan dan Evaluasi Kinerja		0,0	14.496.034,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.496.034,0
01.EBD.002.051	Penyusunan SPIP	Utama	0,0	130.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.760,0
01.EBD.002.052	Penyusunan SAKIP	Utama	0,0	190.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.190,0
01.EBD.002.053	Pelaksanaan Survei IKM dan IPK DJKI	Utama	0,0	1.451.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451.920,0
01.EBD.002.054	Peningkatan Kualitas dan Evaluasi Kinerja	Utama	0,0	12.723.164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.723.164,0
01.EBD.003	Layanan Pengelolaan Keuangan		0,0	20.289.873,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.289.873,0
01.EBD.003.051	Pelaksanaan APBN	Utama	0,0	5.352.606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.352.606,0
01.EBD.003.052	Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Pemeriksaan	Utama	0,0	8.762.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.762.452,0
01.EBD.003.053	Pelaksanaan Revisi Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	0,0	4.281.362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.281.362,0
01.EBD.003.054	Pengelolaan PNBP	Utama	0,0	1.893.453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.893.453,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		0,0	552.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552.500,0
01.EBD.952.051	Layanan Perencanaan	Utama	0,0	543.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543.650,0
01.EBD.952.052	Layanan Penganggaran	Utama	0,0	8.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.850,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		0,0	240.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.000,0
01.EBD.953.051	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Utama	0,0	240.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		0,0	508.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508.000,0
01.EBD.955.051	Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Utama	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.000,0
01.EBD.955.052	Penyusunan Laporan Keuangan	Utama	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.000,0
01.EBD.955.053	Pendampingan Tindak Lanjut Temuan BPK	Utama	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.000,0
01.EBD.955.054	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Utama	0,0	127.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.000,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		0,0	4.009.108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.009.108,0
01.EBD.961.051	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	0,0	3.573.153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.573.153,0
01.EBD.961.052	Supervisi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	0,0	435.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435.955,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		0,0	6.193.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.193.640,0
01.EBD.974.051	Pengelolaan Arsip	Utama	0,0	6.193.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.193.640,0
01.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	2.756.904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.756.904,0
01.PFA.001	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia		0,0	2.756.904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.756.904,0
01.PFA.001.051	Penyusunan Roadmap dan Naskah Konsepsi RPerpres Pengembangan KI	Utama	0,0	2.756.904,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.756.904,0
Total			82.832.134,0	252.435.918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335.268.052,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
4. KEGIATAN

:

7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

02 - Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri		14.782.755,0
01.01	Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan	90	
01.02	Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan	85	
01.03	Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal	120	
Total			14.782.755,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri										14.782.755,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										2.642.520,0
01.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal										2.642.520,0
	051 - Perumusan NSPK di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal										2.642.520,0
		Pusat	Pusat								2.642.520,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya										11.500.099,0
01.BAH.001	Layanan Hak Cipta										1.325.548,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penyelesaian Permohonan Pencatatan Hak Cipta										1.325.548,0
		Pusat	Pusat								1.325.548,0
01.BAH.002	Layanan Desain Industri										8.657.499,0
	051 - Penyelesaian Permohonan Desain Industri										8.657.499,0
		Pusat	Pusat								8.657.499,0
01.BAH.003	Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri										236.370,0
	051 - Pelaksanaan Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri										236.370,0
		Pusat	Pusat								236.370,0
01.BAH.004	Layanan Kekayaan Intelektual Komunal										1.280.682,0
	051 - Inventarisasi dan Integrasi Data Kekayaan Intelektual Komunal										1.280.682,0
		Pusat	Pusat								1.280.682,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga										640.136,0
01.BDB.001	Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif										640.136,0
	051 - Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif										640.136,0
		Pusat	Pusat								640.136,0
Total											14.782.755,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri				14.782.755,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		2.642.520,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal	3	NSPK		2.642.520,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal	0,0	NSPK	0,0	2.642.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanan		11.500.099,0				0,0	0,0	0,0
01.BAH.001	Layanan Hak Cipta	120000	layanan		1.325.548,0	120000	120000	120000	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.051	Penyelesaian Permohonan Pencatatan Hak Cipta	0,0	Layanan	0,0	1.325.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAH.002	Layanan Desain Industri	5500	layanan		8.657.499,0	6050	6655	7321	0,0	0,0	0,0
01.BAH.002.051	Penyelesaian Permohonan Desain Industri	0,0	Layanan	0,0	8.657.499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.003	Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	300	layanan		236.370,0	300	300	300	0,0	0,0	0,0
01.BAH.003.051	Pelaksanaan Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	0,0	Dokumen	0,0	236.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.004	Layanan Kekayaan Intelektual Komunal	1200	layanan		1.280.682,0	1200	1200	1200	0,0	0,0	0,0
01.BAH.004.051	Inventarisasi dan Integrasi Data Kekayaan Intelektual Komunal	0,0	Dokumen	0,0	1.280.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga		640.136,0				0,0	0,0	0,0
01.BDB.001	Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif	1	Lembaga		640.136,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.BDB.001.051	Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif	0,0	Lembaga	0,0	640.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					14.782.755,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri		0,0	14.782.755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.782.755,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	2.642.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.642.520,0
01.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal		0,0	2.642.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.642.520,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal	Utama	0,0	2.642.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.642.520,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		0,0	11.500.099,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.500.099,0
01.BAH.001	Layanan Hak Cipta		0,0	1.325.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.325.548,0
01.BAH.001.051	Penyelesaian Permohonan Pencatatan Hak Cipta	Utama	0,0	1.325.548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.325.548,0
01.BAH.002	Layanan Desain Industri		0,0	8.657.499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.657.499,0
01.BAH.002.051	Penyelesaian Permohonan Desain Industri	Utama	0,0	8.657.499,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.657.499,0
01.BAH.003	Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri		0,0	236.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.370,0
01.BAH.003.051	Pelaksanaan Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	Utama	0,0	236.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236.370,0
01.BAH.004	Layanan Kekayaan Intelektual Komunal		0,0	1.280.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280.682,0
01.BAH.004.051	Inventarisasi dan Integrasi Data Kekayaan Intelektual Komunal	Utama	0,0	1.280.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.280.682,0
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		0,0	640.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640.136,0
01.BDB.001	Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif		0,0	640.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640.136,0
01.BDB.001.051	Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif	Utama	0,0	640.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640.136,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
Total			0,0	14.782.755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.782.755,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
4. KEGIATAN

:

7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

05 - Direktorat Kerja Sama dan Edukasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual		13.601.270,0
01.01	Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang ditindaklanjuti	80	
02	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		17.294.358,0
02.01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual	70	
02.02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	10	
Total			30.895.628,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual										13.601.270,0
01.AEC	Kerja sama										13.146.788,0
01.AEC.001	Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual										9.111.206,0
	051 - Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri di Bidang KI										5.596.508,0
		Pusat	Pusat								5.596.508,0
	052 - Implementasi Kerja Sama Luar Negeri di Bidang KI										3.514.698,0
		Pusat	Pusat								3.514.698,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEC.002	Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual										4.035.582,0
	051 - Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI										533.204,0
		Pusat	Pusat								533.204,0
	052 - Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI										2.282.912,0
		Pusat	Pusat								2.282.912,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI										1.219.466,0
		Pusat	Pusat								1.219.466,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										454.482,0
01.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual										454.482,0
	051 - Perumusan NSPK di Bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual										454.482,0
		Pusat	Pusat								454.482,0
02	<i>Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual</i>										17.294.358,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										17.294.358,0
02.BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual										10.813.524,0
	051 - Pelaksanaan Diseminasi KI										10.803.424,0
		Pusat	Pusat								10.803.424,0
	052 - Monitoring dan Evaluasi Diseminasi KI										10.100,0
		Pusat	Pusat								10.100,0
02.BDC.002	Edukasi Kekayaan Intelektual										3.331.122,0
	051 - Pelaksanaan Edukasi KI										3.059.203,0
		Pusat	Pusat								3.059.203,0
	052 - Monitoring dan Evaluasi Edukasi KI										3.240,0
		Pusat	Pusat								3.240,0
	053 - Pengelolaan Perpustakaan KI										268.679,0
		Pusat	Pusat								268.679,0
02.BDC.003	Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual										3.149.712,0
	051 - Fasilitasi Majelis Pengawas Konsultan KI										1.697.797,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.697.797,0
	052 - Pengangkatan dan Peningkatan Kapasitas Konsultan KI										1.451.915,0
		Pusat	Pusat								1.451.915,0
Total											30.895.628,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual				13.601.270,0				0,0	0,0	0,0
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan		13.146.788,0				0,0	0,0	0,0
01.AEC.001	Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual	27	Kesepakatan		9.111.206,0	27	27	27	0,0	0,0	0,0
01.AEC.001.051	Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri di Bidang KI	0,0	Kesepakatan	0,0	5.596.508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.001.052	Implementasi Kerja Sama Luar Negeri di Bidang KI	0,0	Kesepakatan	0,0	3.514.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002	Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual	35	Kesepakatan		4.035.582,0	35	35	35	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002.051	Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI	0,0	Kesepakatan	0,0	533.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002.052	Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI	0,0	Kesepakatan	0,0	2.282.912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI	0,0	Kesepakatan	0,0	1.219.466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		454.482,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	5	NSPK		454.482,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	1.749.834,0	NSPK	0,3	454.482,0	1.749.834,0	1.749.834,0	1.749.834,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual				17.294.358,0				0,0	0,0	0,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		17.294.358,0				0,0	0,0	0,0
02.BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual	10000	Orang		10.813.524,0	10000	10000	10000	0,0	0,0	0,0
02.BDC.001.051	Pelaksanaan Diseminasi KI	0,0	Orang	0,0	10.803.424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.001.052	Monitoring dan Evaluasi Diseminasi KI	0,0	Orang	0,0	10.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002	Edukasi Kekayaan Intelektual	10000	Orang		3.331.122,0	10000	10000	10000	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002.051	Pelaksanaan Edukasi KI	0,0	Orang	0,0	3.059.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002.052	Monitoring dan Evaluasi Edukasi KI	0,0	Orang	0,0	3.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002.053	Pengelolaan Perpustakaan KI	0,0	Orang	0,0	268.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.BDC.003	Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual	1000	Orang		3.149.712,0	1000	1000	1000	0,0	0,0	0,0
02.BDC.003.051	Fasilitasi Majelis Pengawas Konsultan KI	0,0	Orang	0,0	1.697.797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.003.052	Pengangkatan dan Peningkatan Kapasitas Konsultan KI	0,0	Orang	0,0	1.451.915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					30.895.628,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual		0,0	13.601.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.601.270,0
01.AEC	Kerja sama		0,0	13.146.788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.146.788,0
01.AEC.001	Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual		0,0	9.111.206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.111.206,0
01.AEC.001.051	Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri di Bidang KI	Utama	0,0	5.596.508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.596.508,0
01.AEC.001.052	Implementasi Kerja Sama Luar Negeri di Bidang KI	Utama	0,0	3.514.698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.514.698,0
01.AEC.002	Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual		0,0	4.035.582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.035.582,0
01.AEC.002.051	Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI	Utama	0,0	533.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533.204,0
01.AEC.002.052	Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI	Utama	0,0	2.282.912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.282.912,0
01.AEC.002.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang KI	Utama	0,0	1.219.466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.219.466,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	454.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454.482,0
01.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual		0,0	454.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454.482,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	Utama	0,0	454.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454.482,0
02	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		0,0	17.294.358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.294.358,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		0,0	17.294.358,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.294.358,0
02.BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual		0,0	10.813.524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.813.524,0
02.BDC.001.051	Pelaksanaan Diseminasi KI	Utama	0,0	10.803.424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.803.424,0
02.BDC.001.052	Monitoring dan Evaluasi Diseminasi KI	Utama	0,0	10.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.100,0
02.BDC.002	Edukasi Kekayaan Intelektual		0,0	3.331.122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.331.122,0
02.BDC.002.051	Pelaksanaan Edukasi KI	Utama	0,0	3.059.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.059.203,0
02.BDC.002.052	Monitoring dan Evaluasi Edukasi KI	Utama	0,0	3.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.240,0
02.BDC.002.053	Pengelolaan Perpustakaan KI	Utama	0,0	268.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268.679,0
02.BDC.003	Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual		0,0	3.149.712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.149.712,0
02.BDC.003.051	Fasilitasi Majelis Pengawas Konsultan KI	Utama	0,0	1.697.797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.697.797,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.BDC.003.052	Pengangkatan dan Peningkatan Kapasitas Konsultan KI	Utama	0,0	1.451.915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451.915,0
Total			0,0	30.895.628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.895.628,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
4. KEGIATAN

:

7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

04 - Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis		17.545.103,0
01.01	Persentase Layanan Merek yang Diselesaikan	90	
01.02	Persentase Layanan Indikasi Geografis yang Ditindaklanjuti	80	
Total			17.545.103,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis										17.545.103,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										4.292.479,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis										4.292.479,0
	051 - Perumusan NSPK di Bidang Merek dan Indikasi Geografis										3.227.085,0
		Pusat	Pusat								3.227.085,0
	052 - Monitoring dan Evaluasi NSPK di Bidang Merek dan Indikasi Geografis										1.065.394,0
		Pusat	Pusat								1.065.394,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya										13.252.624,0
01.BAH.001	Layanan Merek										3.534.910,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penyelesaian Permohonan Merek										3.534.910,0
		Pusat	Pusat								3.534.910,0
01.BAH.002	Layanan Indikasi Geografis										4.968.675,0
	051 - Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis										2.427.019,0
		Pusat	Pusat								2.427.019,0
	052 - Pengawasan Indikasi Geografis yang Terdaftar										2.541.656,0
		Pusat	Pusat								2.541.656,0
01.BAH.003	Keputusan atas Permohonan Banding Merek										3.992.555,0
	051 - Penyelesaian Permohonan Banding Merek										3.992.555,0
		Pusat	Pusat								3.992.555,0
01.BAH.004	Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis										756.484,0
	051 - Pelaksanaan Advokasi Hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis										756.484,0
		Pusat	Pusat								756.484,0
Total											17.545.103,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis				17.545.103,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		4.292.479,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	2	NSPK		4.292.479,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	0,0	NSPK	0,0	3.227.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.052	Monitoring dan Evaluasi NSPK di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	0,0	NSPK	0,0	1.065.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanan		13.252.624,0				0,0	0,0	0,0
01.BAH.001	Layanan Merek	99000	layanan		3.534.910,0	99000	99000	99000	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.051	Penyelesaian Permohonan Merek	0,0	Layanan	0,0	3.534.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.002	Layanan Indikasi Geografis	18	layanan		4.968.675,0	18	18	18	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAH.002.051	Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis	0,0	Layanan	0,0	2.427.019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.002.052	Pengawasan Indikasi Geografis yang Terdaftar	0,0	Layanan	0,0	2.541.656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.003	Keputusan atas Permohonan Banding Merek	540	layanan		3.992.555,0	540	540	540	0,0	0,0	0,0
01.BAH.003.051	Penyelesaian Permohonan Banding Merek	0,0	Layanan	0,0	3.992.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.004	Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	245	layanan		756.484,0	245	245	245	0,0	0,0	0,0
01.BAH.004.051	Pelaksanaan Advokasi Hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis	0,0	Layanan	0,0	756.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					17.545.103,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis		0,0	17.545.103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.545.103,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	4.292.479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.292.479,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis		0,0	4.292.479,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.292.479,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Utama	0,0	3.227.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.227.085,0
01.AFA.001.052	Monitoring dan Evaluasi NSPK di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	Utama	0,0	1.065.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.065.394,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		0,0	13.252.624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.252.624,0
01.BAH.001	Layanan Merek		0,0	3.534.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.534.910,0
01.BAH.001.051	Penyelesaian Permohonan Merek	Utama	0,0	3.534.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.534.910,0
01.BAH.002	Layanan Indikasi Geografis		0,0	4.968.675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.968.675,0
01.BAH.002.051	Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis	Utama	0,0	2.427.019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.427.019,0
01.BAH.002.052	Pengawasan Indikasi Geografis yang Terdaftar	Utama	0,0	2.541.656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.541.656,0
01.BAH.003	Keputusan atas Permohonan Banding Merek		0,0	3.992.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.992.555,0
01.BAH.003.051	Penyelesaian Permohonan Banding Merek	Utama	0,0	3.992.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.992.555,0
01.BAH.004	Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis		0,0	756.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.484,0
01.BAH.004.051	Pelaksanaan Advokasi Hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis	Utama	0,0	756.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.484,0
Total			0,0	17.545.103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.545.103,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Meningkatkan Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
4. KEGIATAN

:

7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

03 - Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang		26.744.976,0
01.01	Persentase Layanan Paten yang Ditindaklanjuti	80	
01.02	Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Diselesaikan	90	
01.03	Persentase Layanan Rahasia Dagang yang Diselesaikan	90	
Total			26.744.976,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										26.744.976,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										9.784.214,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang										9.784.214,0
	051 - Perumusan NSPK di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang										9.784.214,0
		Pusat	Pusat								9.784.214,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya										16.960.762,0
01.BAH.001	Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang										13.082.033,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										11.911.683,0
		Pusat	Pusat								11.911.683,0
	052 - Penyelesaian Pasca Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										684.250,0
		Pusat	Pusat								684.250,0
	053 - Penelusuran Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										486.100,0
		Pusat	Pusat								486.100,0
01.BAH.002	Keputusan atas Permohonan Banding Paten										3.639.149,0
	051 - Penyelesaian Permohonan Banding Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										3.639.149,0
		Pusat	Pusat								3.639.149,0
01.BAH.003	Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										239.580,0
	051 - Pelaksanaan Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang										239.580,0
		Pusat	Pusat								239.580,0
Total											26.744.976,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang				26.744.976,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		9.784.214,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	3	NSPK		9.784.214,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	0,0	NSPK	0,0	9.784.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanan		16.960.762,0				0,0	0,0	0,0
01.BAH.001	Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	13000	layanan		13.082.033,0	13000	13000	13000	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.051	Penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	0,0	Layanan	0,0	11.911.683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.BAH.001.052	Penyelesaian Pasca Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	0,0	Layanan	0,0	684.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.053	Penelusuran Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	0,0	Layanan	0,0	486.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.002	Keputusan atas Permohonan Banding Paten	25	layanan		3.639.149,0	25	25	25	0,0	0,0	0,0
01.BAH.002.051	Penyelesaian Permohonan Banding Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	0,0	Layanan	0,0	3.639.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.003	Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	175	layanan		239.580,0	175	175	175	0,0	0,0	0,0
01.BAH.003.051	Pelaksanaan Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	0,0	Layanan	0,0	239.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					26.744.976,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang		0,0	26.744.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.744.976,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	9.784.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.784.214,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		0,0	9.784.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.784.214,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Utama	0,0	9.784.214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.784.214,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		0,0	16.960.762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.960.762,0
01.BAH.001	Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		0,0	13.082.033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.082.033,0
01.BAH.001.051	Penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Utama	0,0	11.911.683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.911.683,0
01.BAH.001.052	Penyelesaian Pasca Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Utama	0,0	684.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684.250,0
01.BAH.001.053	Penelusuran Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Utama	0,0	486.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486.100,0
01.BAH.002	Keputusan atas Permohonan Banding Paten		0,0	3.639.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.639.149,0
01.BAH.002.051	Penyelesaian Permohonan Banding Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Utama	0,0	3.639.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.639.149,0
01.BAH.003	Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang		0,0	239.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.580,0
01.BAH.003.051	Pelaksanaan Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Utama	0,0	239.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.580,0
Total			0,0	26.744.976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.744.976,0

Razilu
NIP. 196511281991031002

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

03 - Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia
4. KEGIATAN

:

7119 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

07 - Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal		7.985.663,0
01.01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	30	
01.02	Persentase Penyelesaian Sengketa HKI Non Litigasi Secara Optimal	90	
Total			7.985.663,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal</i>										7.985.663,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										2.277.596,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI										2.277.596,0
	051 - Perumusan NSPK di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual										1.315.390,0
		Pusat	Pusat								1.315.390,0
	052 - Monitoring dan Evaluasi NSPK di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual										962.206,0
		Pusat	Pusat								962.206,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya										1.503.528,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.BAH.001	Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual										1.503.528,0
	051 - Pencegahan Pelanggaran HKI ke Pelaku Usaha										859.268,0
		Pusat	Pusat								859.268,0
	052 - Pencegahan Pelanggaran HKI ke Perguruan Tinggi										644.260,0
		Pusat	Pusat								644.260,0
01.BCE	Penanganan Perkara										4.204.539,0
01.BCE.001	Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual										3.767.805,0
	051 - Verifikasi Kelayakan Aduan Pelanggaran HKI										130.530,0
		Pusat	Pusat								130.530,0
	052 - Pengawasan dan Pengamatan Aduan Pelanggaran HKI										784.800,0
		Pusat	Pusat								784.800,0
	053 - Penindakan Aduan Pelanggaran HKI										2.309.591,0
		Pusat	Pusat								2.309.591,0
	054 - Pengawasan dan Pemantauan Produk di Bidang Kekayaan Intelektual										99.930,0
		Pusat	Pusat								99.930,0
	055 - Penutupan Situs/Platform Pelanggaran HKI										121.458,0
		Pusat	Pusat								121.458,0
	056 - Monitoring dan Evaluasi Penindakan Aduan Pelanggaran HKI										321.496,0
		Pusat	Pusat								321.496,0
01.BCE.002	Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI										436.734,0
	051 - Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI										436.734,0
		Pusat	Pusat								436.734,0
Total											7.985.663,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal				7.985.663,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		2.277.596,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI	2	NSPK		2.277.596,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	2,0	Dokumen	657.695,0	1.315.390,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.052	Monitoring dan Evaluasi NSPK di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	2,0	Dokumen	481.103,0	962.206,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanan		1.503.528,0				0,0	0,0	0,0
01.BAH.001	Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	65	layanan		1.503.528,0	65	65	65	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.051	Pencegahan Pelanggaran HKI ke Pelaku Usaha	65,0	Titik	13.219,5	859.268,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.052	Pencegahan Pelanggaran HKI ke Perguruan Tinggi	65,0	Titik	9.911,7	644.260,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		4.204.539,0				0,0	0,0	0,0
01.BCE.001	Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	25	Perkara		3.767.805,0	25	25	25	0,0	0,0	0,0
01.BCE.001.051	Verifikasi Kelayakan Aduan Pelanggaran HKI	25,0	Perkara	5.221,2	130.530,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.001.052	Pengawasan dan Pengamatan Aduan Pelanggaran HKI	25,0	Perkara	31.392,0	784.800,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.001.053	Penindakan Aduan Pelanggaran HKI	25,0	Perkara	92.383,6	2.309.591,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.001.054	Pengawasan dan Pemantauan Produk di Bidang Kekayaan Intelektual	25,0	Perkara	3.997,2	99.930,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.001.055	Penutupan Situs/Platform Pelanggaran HKI	25,0	Perkara	4.858,3	121.458,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.001.056	Monitoring dan Evaluasi Penindakan Aduan Pelanggaran HKI	25,0	Kegiatan	12.859,8	321.496,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.002	Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI	18	Perkara		436.734,0	18	18	18	0,0	0,0	0,0
01.BCE.002.051	Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI	18,0	Perkara	24.263,0	436.734,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Total					7.985.663,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal		0,0	7.985.663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.985.663,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	2.277.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.277.596,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI		0,0	2.277.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.277.596,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Utama	0,0	1.315.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.315.390,0
01.AFA.001.052	Monitoring dan Evaluasi NSPK di Bidang Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	Utama	0,0	962.206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962.206,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		0,0	1.503.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.503.528,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BAH.001	Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		0,0	1.503.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.503.528,0
01.BAH.001.051	Pencegahan Pelanggaran HKI ke Pelaku Usaha	Utama	0,0	859.268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	859.268,0
01.BAH.001.052	Pencegahan Pelanggaran HKI ke Perguruan Tinggi	Utama	0,0	644.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644.260,0
01.BCE	Penanganan Perkara		0,0	4.204.539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.204.539,0
01.BCE.001	Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		0,0	3.767.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.767.805,0
01.BCE.001.051	Verifikasi Kelayakan Aduan Pelanggaran HKI	Utama	0,0	130.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.530,0
01.BCE.001.052	Pengawasan dan Pengamatan Aduan Pelanggaran HKI	Utama	0,0	784.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	784.800,0
01.BCE.001.053	Penindakan Aduan Pelanggaran HKI	Utama	0,0	2.309.591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.309.591,0
01.BCE.001.054	Pengawasan dan Pemantauan Produk di Bidang Kekayaan Intelektual	Utama	0,0	99.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99.930,0
01.BCE.001.055	Penutupan Situs/Platform Pelanggaran HKI	Utama	0,0	121.458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121.458,0
01.BCE.001.056	Monitoring dan Evaluasi Penindakan Aduan Pelanggaran HKI	Utama	0,0	321.496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321.496,0
01.BCE.002	Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI		0,0	436.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436.734,0
01.BCE.002.051	Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI	Utama	0,0	436.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	436.734,0
Total			0,0	7.985.663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.985.663,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

04 - Meningkatkan Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
4. KEGIATAN

:

7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

06 - Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terselenggaranya Layanan TIK sebagai enabler layanan KI		53.488.148,0
01.01	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen KI (availability time)	98	
Total			53.488.148,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya Layanan TIK sebagai enabler layanan KI</i>										53.488.148,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										4.981.622,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual										4.981.622,0
	051 - Perumusan NSPK di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual										4.981.622,0
		Pusat	Pusat								4.981.622,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik										10.125,0
01.BMA.001	Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual										10.125,0
	051 - Fasilitasi Pengelolaan Satu Data Kementerian										10.125,0
		Pusat	Pusat								10.125,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										33.943.824,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual										33.943.824,0
	051 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										3.110.170,0
		Pusat	Pusat								3.110.170,0
	052 - Pengadaan Software										26.967.846,0
		Pusat	Pusat								26.967.846,0
	053 - Pengadaan Jaringan										3.865.808,0
		Pusat	Pusat								3.865.808,0
01.CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										351.837,0
01.CDS.001	Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual										351.837,0
	051 - Layanan Pemeliharaan Data Center										351.837,0
		Pusat	Pusat								351.837,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan										14.200.740,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Kekayaan Intelektual										14.200.740,0
	051 - Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi										11.783.800,0
		Pusat	Pusat								11.783.800,0
	052 - Alih Pengetahuan di Bidang Teknologi Informasi										1.263.794,0
		Pusat	Pusat								1.263.794,0
	053 - Penyusunan Dokumen Tata Kelola TIK										1.153.146,0
		Pusat	Pusat								1.153.146,0
Total											53.488.148,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terselenggaranya Layanan TIK sebagai enabler layanan KI				53.488.148,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		4.981.622,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	5	NSPK		4.981.622,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	0,0	NSPK	0,0	4.981.622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		dokumen/ Peta/ Data		10.125,0				0,0	0,0	0,0
01.BMA.001	Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual	29	Data		10.125,0	29	29	29	0,0	0,0	0,0
01.BMA.001.051	Fasilitasi Pengelolaan Satu Data Kementerian	1,0	Data	10.125,0	10.125,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		33.943.824,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual	6	Unit		33.943.824,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0,0	Unit	0,0	3.110.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAN.001.052	Pengadaan Software	0,0	Unit	0,0	26.967.846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAN.001.053	Pengadaan Jaringan	0,0	Unit	0,0	3.865.808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit/ KabKota/ Kecamatan/ TitikLokasi		351.837,0				0,0	0,0	0,0
01.CDS.001	Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual	3	Titik/Lokasi		351.837,0	3	3	4	0,0	0,0	0,0
01.CDS.001.051	Layanan Pemeliharaan Data Center	0,0	Unit	0,0	351.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		Sistem Informasi		14.200.740,0				0,0	0,0	0,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Kekayaan Intelektual	38	Sistem Informasi		14.200.740,0	38	38	38	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.051	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	0,0	Sistem Informasi	0,0	11.783.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.052	Alih Pengetahuan di Bidang Teknologi Informasi	0,0	Sistem Informasi	0,0	1.263.794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FAB.001.053	Penyusunan Dokumen Tata Kelola TIK	0,0	Dokumen	0,0	1.153.146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					53.488.148,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya Layanan TIK sebagai enabler layanan KI		0,0	53.488.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53.488.148,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		0,0	4.981.622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.981.622,0
01.AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		0,0	4.981.622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.981.622,0
01.AFA.001.051	Perumusan NSPK di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Utama	0,0	4.981.622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.981.622,0
01.BMA	Data dan Informasi Publik		0,0	10.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.125,0
01.BMA.001	Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual		0,0	10.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.125,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.BMA.001.051	Fasilitasi Pengelolaan Satu Data Kementerian	Utama	0,0	10.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.125,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	33.943.824,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.943.824,0
01.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual		0,0	33.943.824,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.943.824,0
01.CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Utama	0,0	3.110.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.110.170,0
01.CAN.001.052	Pengadaan Software	Utama	0,0	26.967.846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.967.846,0
01.CAN.001.053	Pengadaan Jaringan	Utama	0,0	3.865.808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.865.808,0
01.CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	351.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351.837,0
01.CDS.001	Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual		0,0	351.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351.837,0
01.CDS.001.051	Layanan Pemeliharaan Data Center	Utama	0,0	351.837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351.837,0
01.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan		0,0	14.200.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.200.740,0
01.FAB.001	Sistem Informasi Kekayaan Intelektual		0,0	14.200.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.200.740,0
01.FAB.001.051	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Utama	0,0	11.783.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.783.800,0
01.FAB.001.052	Alih Pengetahuan di Bidang Teknologi Informasi	Utama	0,0	1.263.794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263.794,0
01.FAB.001.053	Penyusunan Dokumen Tata Kelola TIK	Utama	0,0	1.153.146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153.146,0
Total			0,0	53.488.148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53.488.148,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

KEMENTERIAN HUKUM
2. PROGRAM

:

BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3. SASARAN PROGRAM

:

03 - Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia
04 - Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual
4. KEGIATAN

:

7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

09 - Kantor Wilayah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah		5.595.203,0
01.01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	
02	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah		68.948.135,0
02.01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70	
02.02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20	
Total			74.543.338,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>										5.595.203,0
01.BKB	Pemantauan produk										5.595.203,0
01.BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah										5.595.203,0
	051 - Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah										3.699.397,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								189.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								162.092,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								48.800,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								69.980,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								104.280,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								59.100,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								209.095,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								83.810,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								35.584,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								74.060,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								35.590,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								242.976,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								154.050,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								12.470,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								37.290,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								53.489,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								614.476,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								55.505,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								181.448,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								81.230,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								18.855,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								165.310,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								182.944,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								11.890,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								130.950,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								133.260,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								84.245,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								83.180,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								91.090,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								122.174,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								19.592,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								91.600,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								59.982,0
	052 - Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah										1.455.325,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								41.990,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								58.195,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								21.410,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								44.504,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								889,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								60.000,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								84.411,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								83.810,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								42.664,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								16.910,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								2.992,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								62.078,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								270.210,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								56.398,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								15.450,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								12.320,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								43.100,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								35.405,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								11.080,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								56.660,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								18.855,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								24.981,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								30.895,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								10.090,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								15.814,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								40.670,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								27.488,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								22.190,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								30.784,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								59.700,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								19.592,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								93.100,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								40.690,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah										440.481,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								200,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								10.632,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								945,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								3.480,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								260,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								1.630,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								1.490,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								28.910,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								870,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								3.470,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								5.280,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								27.060,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								22.920,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								28.150,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								3.075,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								72.600,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								2.310,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								200,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								11.092,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								875,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								39.005,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								2.526,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								2.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								1.895,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								33.250,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								250,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								21.830,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								77.100,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								36.176,0
02	<i>Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>										68.948.135,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										68.948.135,0
02.BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah										42.551.521,0
	051 - Persiapan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah										120.029,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								2.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								1.140,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								2.835,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								4.330,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								475,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								7.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								2.080,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								960,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								6.110,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								1.980,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								360,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								2.310,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								1.420,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								5.700,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								3.620,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								4.875,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								3.120,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								2.305,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								270,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								1.386,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								3.420,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								5.760,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								750,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								1.872,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								2.376,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								4.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								8.890,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								2.100,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								500,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								9.380,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								13.425,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								12.380,0
	052 - Pelaksanaan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah										42.275.465,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								1.235.820,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								1.367.054,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								1.516.960,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								1.348.886,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								1.157.723,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								1.423.510,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								1.231.255,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								1.146.297,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								944.529,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								1.477.756,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								2.253.944,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								2.315.546,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								1.424.648,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								2.024.554,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								2.480.926,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								2.191.291,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								1.111.430,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								962.150,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								1.204.660,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								780.883,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								957.480,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								1.181.117,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								512.451,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								840.840,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								1.050.654,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								1.299.931,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								955.596,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								1.072.266,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								1.344.352,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								672.440,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								1.234.531,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								622.250,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								931.735,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah										156.027,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								292,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								15.390,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								945,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								4.330,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								1.075,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								4.630,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								1.434,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								1.065,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								870,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								2.254,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								17.490,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								3.080,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								4.220,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								8.750,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								7.240,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								3.120,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								2.875,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								800,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								3.426,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								5.221,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								14.790,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								5.020,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								4.260,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								6.400,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								9.890,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								150,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								250,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								7.880,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								7.580,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								11.300,0
02.BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah										24.417.785,0
	051 - Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah										24.263.292,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								589.670,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								845.272,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								530.704,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								604.970,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								371.688,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								400.565,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								696.001,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								752.826,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								718.462,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								461.054,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								68.250,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								703.916,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								859.975,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								895.541,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								1.041.901,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								280.800,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								878.740,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								1.062.238,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								591.666,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								871.862,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								707.761,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								991.561,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								715.324,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								1.007.080,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								1.135.927,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								1.125.817,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								1.019.224,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								728.884,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								398.445,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								944.608,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								727.369,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								863.830,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								671.361,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah										154.493,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								200,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								13.890,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								945,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								2.590,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								888,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								4.630,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								3.500,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								960,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								2.070,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								3.382,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								3.550,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								3.960,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								4.220,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								3.670,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								7.240,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								4.250,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								3.120,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								2.205,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								1.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								3.426,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								5.610,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								2.020,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								5.770,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								7.547,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								6.400,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								8.280,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								3.600,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								890,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								3.940,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								16.240,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								24.500,0
02.BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual										1.978.829,0
	051 - Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual										1.978.829,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								60.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								58.500,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								59.850,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								60.000,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								67.490,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								60.000,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								54.940,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								56.500,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								59.970,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								50.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								60.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								59.850,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								60.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								60.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								60.000,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								57.270,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								60.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								57.050,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								60.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								60.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								59.995,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								67.360,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								120.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								37.600,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								52.745,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								60.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								60.000,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								56.850,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								60.000,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								52.309,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								60.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								50.500,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								60.000,0
Total											74.543.338,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah				5.595.203,0				0,0	0,0	0,0
01.BKB	Pemantauan produk		Produk/ Layanan		5.595.203,0				0,0	0,0	0,0
01.BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	94	Layanan		5.595.203,0	94	94	144	0,0	0,0	0,0
01.BKB.001.051	Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	0,0	Laporan	0,0	3.699.397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BKB.001.052	Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	0,0	Laporan	0,0	1.455.325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BKB.001.053	Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	0,0	Laporan	0,0	440.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah				68.948.135,0				0,0	0,0	0,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		68.948.135,0				0,0	0,0	0,0
02.BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	32821	Orang		42.551.521,0	32821	32821	32821	0,0	0,0	0,0
02.BDC.001.051	Persiapan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	5.300,0	Orang	22,6	120.029,0	5.300,0	5.300,0	5.300,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.001.052	Pelaksanaan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	5.290,0	Orang	7.991,6	42.275.465,0	5.290,0	5.290,0	5.290,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.001.053	Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	4.680,0	Orang	33,3	156.027,0	4.680,0	4.680,0	4.680,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	9768	Orang		24.417.785,0	9768	9768	9768	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002.051	Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	9.888,0	Orang	2.453,8	24.263.292,0	9.888,0	9.888,0	9.888,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.002.052	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	400,0	Orang	386,2	154.493,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	4950	Orang		1.978.829,0	4950	4950	4950	0,0	0,0	0,0
02.BDC.003.051	Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	4.950,0	Orang	399,8	1.978.829,0	4.950,0	4.950,0	4.950,0	0,0	0,0	0,0
Total					74.543.338,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah		0,0	5.595.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.595.203,0
01.BKB	Pemantauan produk		0,0	5.595.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.595.203,0
01.BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		0,0	5.595.203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.595.203,0
01.BKB.001.051	Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	3.699.397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.699.397,0
01.BKB.001.052	Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	1.455.325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455.325,0
01.BKB.001.053	Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	Utama	0,0	440.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440.481,0
02	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah		0,0	68.948.135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.948.135,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		0,0	68.948.135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.948.135,0
02.BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		0,0	42.551.521,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.551.521,0
02.BDC.001.051	Persiapan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	120.029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.029,0
02.BDC.001.052	Pelaksanaan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	42.275.465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.275.465,0
02.BDC.001.053	Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	156.027,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156.027,0
02.BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		0,0	24.417.785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.417.785,0
02.BDC.002.051	Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	24.263.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.263.292,0
02.BDC.002.052	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Utama	0,0	154.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154.493,0
02.BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		0,0	1.978.829,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.978.829,0
02.BDC.003.051	Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	Utama	0,0	1.978.829,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.978.829,0
Total			0,0	74.543.338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.543.338,0

Jakarta, 06 Januari 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002